

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI DAN KELEMAHAN PENELITIAN

Pada bab 5 ini, akan dikemukakan simpulan, rekomendasi, implikasi dan kelemahan penelitian yang didapat dengan berdasarkan pada pembahasan pada bab IV sebagai berikut:

5.1. Simpulan

Pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital dapat menjadi referensi dalam meningkatkan partisipasi politik dalam konvensi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Pengintegrasian poin partisipasi politik dalam model *civic engagement* dapat mengembangkan pengetahuan, perilaku, sikap yang dapat menggerakkan partisipasi politik. Hasil ini juga telah peneliti publikasikan pada *Universal Journal of Educational Research* dengan judul *Promoting Civic Intelligence in Applied Science to Promote Interaction between Science: An Overview in the Perspective of Citizenship Education* sebagai bentuk menyebarluaskan hasil penelitian sehingga memungkinkan untuk dapat menjadi sumber informasi atau rujukan bagi peneliti lainnya. Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Partisipasi politik mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam aspek pengetahuan adalah cukup, yaitu 62,19 % sikap 70,51 % Perilaku 82,03 %. Partisipasi politik mahasiswa terlihat dari penguasaan materi Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah uraian simpulan adalah sebagai berikut.
 - 1.1. Perbandingan partisipasi politik di setiap fakultas di UAD dan UNY cukup dalam pengetahuan berdasarkan argument substansi dalam kajian Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di di UAD dan UNY.
 - 1.2. Perbandingan tingginya partisipasi politik mahasiswa dalam aspek sikap didasari dengan nilai demokrasi yang terinternalisasi pada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memaknai dan memperkuat nilai demokrasi

- 1.3. Perbedaan partisipasi politik mahasiswa di UAD dan UNY diakibatkan oleh perbedaan pengalaman yang didapat mahasiswa selama proses pengembangan berlangsung.
2. Pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital adalah dengan mengembangkan nilai-nilai dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan yang diintegrasikan dengan pengalaman belajar mahasiswa. Sebagai bentuk realisasi halis penelitian, Hasil ini juga telah peneliti publikasikan pada Proceedings of the 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019) di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (ACEC) pada 27-29 Agustus 2019 dengan judul *Reformulating Civic Education as Political Education in Indonesia in the Convergence Era*. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah uraian simpulan adalah sebagai berikut.
- a) Materi pendahuluan tentang Pendidikan Kewarganegaraan yaitu : tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Pancasila sebagai orientasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
 - b) Materi Identitas nasional yaitu : pengertian identitas, sejarah kelahiran identitas nasional, identitas nasional sebagai karakter bangsa, globalisasi dan tantangan identitas nasional.
 - c) Materi UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia: Dinamika dan tantangan konstitusi Indonesia, perilaku konstitusional warga negara yaitu: UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, Dinamika dan tantangan konstitusi Indonesia dan perilaku konstitusi warga negara.
 - d) Materi Hubungan negara dan warga negara, yaitu : Hubungan negara dan warga negara, peranan warga negara.
 - e) Materi Demokrasi, yaitu : menganalisis demokrasi di Indonesia, hakikat demokrasi di Indonesia, pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
 - f) Materi Negara Hukum, Hukum dan HAM yaitu: negara hukum, hubungan negara hukum dan HAM, prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara.

- g) Materi Wawasan nusantara, yaitu : Wilayah sebagai ruang bangsa, wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia, dan Implementasi wawasan nusantara.
 - h) Materi Integrasi nasional, yaitu : esensi dan urgensi ketahanan nasional, model ketahanan nasional, bela negara sebagai pendekatan astagatra dan dinamika, tantangan integrasi nasional.
 - i) Pengalaman belajar mahasiswa dalam materi tersebut adalah terintegrasi dalam pengalaman belajar *project* partisipasi politik, studi kasus, *problem solving*, dan *service learning*
3. Model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital telah diterapkan di UNY dan UAD dengan baik dalam kelas, luar kelas, maupun ruang kelas *online*. Hasil ini juga telah terpublikasikan pada 3rd International Conference On Vocational Education Of Mechanical And Automotive Technology (ICoVEMAT) pada 12 Oktober 2019 di Universitas Negeri Yogyakarta dalam *Journal of Physics: Conference Series 2020* dengan judul *Learning Service Through College Student Organization As A Political Awareness On Higher Education*. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah uraian simpulan adalah sebagai berikut.
- 3.1. Terdapat perbedaan ketercapaian antara kelas eksperimen dan kontrol di UNY, meskipun telah menggunakan tahapan pembelajaran sesuai dengan tahapan dalam pengembangan model belajar keterlibatan (MBK). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, yaitu: motivasi mahasiswa, media, metode, dan teknik dalam pembelajaran, kemampuan mengajar dosen, efisiensi waktu, sarana dan prasarana belajar, situasi dan kondisi pembelajaran.
 - 3.2. Hasil pengeimplementasian model belajar keterlibatan (MBK) berbeda dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, ketercapaian pembelajaran tercapai dengan baik jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Meskipun perbedaan tersebut tidak signifikan, namun perbedaan perlakuan dari dosen pengampu ditentukan dengan hasil dalam penguasaan pelibatan politik pada

mahasiswa.

- 3.3. Hasil pembelajaran pada kelas eksperimen dan kontrol berbeda jika dilihat dari tingkat ketercapaian. Perbedaan hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh perbedaan perlakuan pada setiap pertemuan, selain itu pada kelas kontrol ketercapaian pada aktivitas partisipasi politik meningkat saat Pandemi Covid 19.
- 3.4. Hasil pembelajaran dengan model belajar keterlibatan (MBK) pada aspek sikap, perilaku dan pengetahuan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen memperoleh hasil yang baik. Pada aspek pengetahuan perbedaan dikarenakan terdapat perbedaan kognitif mahasiswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada aspek perilaku, tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena terdapat motivasi dalam pelaksanaan *project* partisipasi politik mahasiswa. Pada aspek sikap, perbedaan kecenderungan bersikap menjadikan hasil pembelajaran pada aspek sikap tidak terlalu signifikan.
- 3.5. Kelebihan model belajar keterlibatan (MBK) adalah mampu memberikan penguatan nilai-nilai demokrasi Indonesia kepada mahasiswa, Memberikan penguatan pada substansi literasi politik, Mengembangkan pengetahuan, *skill* dan sikap politik mahasiswa, Memotivasi untuk praktik dalam kelas mahasiswa, Mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan mahasiswa, Mengembangkan mahasiswa untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya serta mampu memahami permasalahan serta menemukan solusi, Membangun kerjasama, kepekaan sosial, kerja keras, keterampilan kelompok dan individu pada mahasiswa.
- 3.6. Kelemahan model belajar keterlibatan (MBK) adalah terlalu banyak tugas untuk mahasiswa, Membutuhkan waktu lapangan, mahasiswa tidak memahami nilai-nilai demokrasi dalam pelibatan politik, Kurangnya respon dari masyarakat ketika mahasiswa melakukan wawancara dan observasi kegiatan lapangan, Mengurangi interaksi dosen dan mahasiswa di kelas, Kurangnya kerjasama antara mahasiswa saat kegiatan kegiatan melayani di lapangan terjadi, Mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal dan hanya mengikuti kegiatan melayani di lapangan terjadi.

- 3.7. Dampak dari pengimplementasian model belajar keterlibatan (MBK) dalam aspek pengetahuan, sikap dan perilaku terlihat dari 1) pada aspek pengetahuan, sikap dan perilaku kelas eksperimen lebih baik jika dibandingkan dengan kelas kontrol, 2) perbedaan pelibatan politik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam aspek pengetahuan, sikap dan perilaku mengindikasikan perbedaan pemahaman pelibatan politik dalam aspek pengetahuan, sikap dan perilaku pada kelas kontrol.

5.2. Implikasi

Berdasarkan pemaparan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti merumuskan implikasi secara teoritis dan praktis dalam pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital. Implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelibatan politik mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Negeri Yogyakarta dapat turut mengembangkan kompetensi partisipasi politik mahasiswa secara epistemologi, aksiologis dan ontologis. Pada aspek epistemologi hasil penelitian diharapkan dapat meluaskan atau melanjutkan penelitian lanjutan sebagai upaya penguatan pada aspek psiko pedagogis. Pada aspek aksiologis, peneliti berharap dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam hal partisipasi politik sehingga menjadi intelektual muda yang memiliki karakter demokratis, cinta tanah air dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara dengan nilai-nilai Pancasila. Pada aspek ontologis, peneliti berharap dapat memberikan paradigma secara sistematis pada domain Pendidikan Kewarganegaraan baik secara kurikuler maupun sosial kultural.
2. Adanya integrasi nilai partisipasi politik pada materi Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengembangkan kajian ontologis Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian bidang keilmuan. Model belajar keterlibatan (MBK) diperlukan guna mengintegrasikan pelibatan politik berbasis nilai-nilai demokrasi pada materi perkuliahan Pendidikan

Kewarganegaraan yang dikombinasikan dengan pengalaman belajar dalam *project* pelibatan politik.

3. Integrasi partisipasi politik mahasiswa melalui pengalaman *project* partisipasi politik berimplikasi terhadap pengembangan aksiologis Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana dalam meningkatkan kesadaran politik bagi mahasiswa. Selain itu, melalui pengalaman belajar pelibatan politik, selaras dengan upaya perwujudan *smart and good citizenship* yang dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, adanya kesadaran pada mahasiswa tentang keberadaannya sebagai warga dalam negara yang memiliki hak serta kewajiban. Kedua, pengalaman *project* partisipasi politik dapat menunjang penguasaan kompetensi kewarganegaraan dengan cara yang lebih inovatif dan kreatif. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan dalam mengembangkan model belajar keterlibatan (MBK) yang dapat menguatkan partisipasi politik dan *online engagement* merupakan keharusan baik dalam kelas maupun luar kelas khususnya di era digital ini.
4. Pengembangan pada aspek epistemologis adalah Pendidikan Kewarganegaraan dapat berkontribusi terhadap pendidikan politik berbasis kultur budaya Bangsa Indonesia. Untuk penyempurnaan, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi pada kelas yang besar dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan mengintegrasikan pada kearifan lokal sebagai imunisasi dalam penguatan pendidikan politik berbasis *culture*.
5. Secara praktis, implikasi hasil penelitian diharapkan dapat menjadi model rujukan yang dapat diterapkan oleh dosen pengampu Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di seluruh Indonesia Pada Umumnya. Bagi peneliti, memerlukan untuk mendiseminasikan hasil penelitian guna menjadi referensi dalam upaya perwujudan partisipasi politik pada mahasiswa dan perbaikan proses pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi secara umum.

5.3.Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, penelitian ini selanjutnya merekomendasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk partisipasi pelibatan politik dan *civic engagement* warga negara muda di era digital. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, implikasi hasil penelitian yang menggambarkan pengaruh model terhadap partisipasi politik mahasiswa. Kini saatnya peneliti untuk merekomendasikan kepada pihak- pihak terkait dengan hasil penelitian, rekomendasi ini peneliti tujukan pada:

1. Direktorat Pendidikan Tinggi terutama dalam pengembangan kurikulum : direkomendasikan agar melakukan pengembangan materi politik yang termodifikasi dalam mata kuliah pengembangan kepribadian karena masih terbatas. Diperlukan materi yang lebih luas lagi tentang pelibatan politik guna memberikan pemahaman dan keterampilan mahasiswa tentang konsep partisipasi politik dan menuju perwujudan *smart and good citizenship* di Indonesia.
2. Bagi penentu kebijakan pusat, khususnya bagi Departemen Pendidikan Nasional yang menaungi keputusan pendidikan nasional pada lingkungan Dikti : direkomendasikan agar dalam perkuliahan Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dapat mengakomodasi muatan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi partisipasi politik warga negara muda. Selain itu, direkomendasikan agar konsisten dalam melakukan inovasi dalam materi, strategi, teknik, evaluasi, sumber belajar dan model pembelajaran tentang pelibatan politik mahasiswa.
3. Kepada pembuat kebijakan yaitu Wakil Rektor Akademik, Wakil Dekan Akademik, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Dekan di jajaran kampus : direkomendasikan agar hasil penelitian ini peneliti harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akademik guna mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen yang dapat mengembangkan pelibatan

politik mahasiswa pada setiap program studi. Hal ini dikarenakan posisi mahasiswa yang divisikan sebagai generasi intelektual yang Tangguh dalam dinamika kehidupan dan perannya sebagai warga negara yang memiliki hak serta kewajiban.

4. Bagi Pemerintah Daerah, yaitu bagi Dinas Pendidikan Propinsi atau Kota : direkomendasikan agar dapat dijadikan pertimbangan guna menyediakan “ruang” bagi aktivitas politik pemuda, sehingga pemuda dapat menjadi garda terdepan dalam perubahan menuju sistem yang lebih demokratis. Selain itu, pemanfaatan kearifan lokal bagi Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota juga sebagai penunjang dalam penguatan pelibatan politik pemuda juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan ketidak tertarikannya pemuda dalam politik.
5. Bagi asosiasi dan komunitas akademik Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan : direkomendasikan agar dapat memberikan wacana terkait tentang pentingnya pelibatan politik. Selain itu, melalui hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai langkah awal dalam inovasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat memberikan rangsangan terhadap atmosfer kehidupandemokrasi
6. Bagi dosen-dosen Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang menjadi ujung tombak keberhasilan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi : direkomendasikan agar menjadikan model ini sebagai referensi dalam penguatan kompetensi mahasiswa dalam aspek pelibatan politik berbasis nilai-nilai demokrasi. Selain itu, dosen dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sehingga dapat mendukung situasi pembelajaran yang dapat mengembangkan partisipasi politik
7. mahasiswa hingga mencapai indikator pelibatan politik secara khusus. Dosen dapat berperan sebagai magnet dalam pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan pembelajaran yang kreatif. Dengan demikian mahasiswa tidak

hanya terkurung pada pengetahuan tentang partisipasi politik, tetapi dapat secara kritis terhadap realitas yang dihadapi terkait dengan partisipasi politik.

8. Bagi mahasiswa : direkomendasikan agar tetap mengedepankan partisipasi politik dengan berbasis pada nilai-nilai demokrasi Pancasila di era digital, sehingga tidak tenggelam dalam euforia digitalisasi dan tetap memahami jati diri bangsa sebagai bangsa Indonesia. Mahasiswa sebagai generasi penerus dengan beal intelektual diharapkan dapat menjadi ujung tombak perubahan, oleh karena itu hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tambahan mahasiswa tentang peran serta hak,kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Bagi peneliti selanjutnya : direkomendasikan agar hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam mengembangkan pengembangan penelitian *civic engagement* yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi Pancasila. Selain itu, juga direkomendasikan agar melakukan kajian lebih luas tentang partisipasi politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada semua jenjang pendidikan, karena penelitian ini masih terbatas pada pengembangan model belajar keterlibatan (MBK) untuk memperkuat partisipasi politik dan *online engagement*.

5.4. Rumusan Dalil Hasil Penelitian

Berdasarkan pada simpulan penelitian, selanjutnya peneliti merumuskan dalil-dalil penelitian sebagai berikut:

Dalil Pertama

Objek materi partisipasi politik ialah warga negara, negara, keputusan politik dan kekuasaan. Objek formal partisipasi politik pada kapasitas pengetahuan adalah substansi materi politik, pada kapasitas sikap adalah nilai universal demokrasi, pada kapasitas perilaku adalah rasionalisasi, motivasi pelibatan politik.

Dalil kedua

Pendekatan dalam partisipasi politik adalah pendekatan partisipasi politik konvensional dan pendekatan partisipasi politik non konvensional.

Dalil ketiga

Partisipasi politik memberikan jalan bagi warga negara untuk menyalurkan sikapnya pada setiap keputusan politik. Bagi mahasiswa, partisipasi politik memberikan wawasan bahwasanya setiap keputusan politik mempunyai konsekuensi logis atas kehidupan politik.

Dalil keempat

Determinan keterlibatan (*engagement*) sipil mencakup individu atau kelompok yang bekerja dalam tindakan politik dan non-politik dalam hal membuat perubahan.

Dalil Kelima

Kajian partisipasi politik merupakan kajian yang interdisipliner yang meliputi ilmu hukum, politik, negara, sosiologi, kebijakan publik, tata negara, sejarah, ekonomi, moral, filsafat, psikologis.

Dalil Keenam

Reaktualisasi partisipasi politik di era digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan membentuk aktivitas pengetahuan kewarganegaraan dengan mengkonstruksi realitas makna akan realitas sosial pada kehidupan sehari-hari warga negara dengan logika digital.

Dalil Ketujuh

Perspektif baru dalam partisipasi politik difokuskan pada pengintegrasian materi partisipasi politik yang kemudian di relevansikan dengan gerakan partisipasi politik pada kurikulum dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pisau analisisnya.

5.5. Kelemahan Penelitian

Penelitian pada disertasi ini mempunyai kelemahan dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Kelemahan penelitian tersebut antara lain:

1. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Negeri Yogyakarta yang notabennya universitas yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ciri khas keistimewaan di Yogyakarta, sehingga hasil yang di dapat dimungkinkan berbeda pada institusi di luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang non daerah keistimewaan.
2. Metode pengumpulan data hanya menggunakan angket, wawancara, dan observasi
3. Variabel yang digunakan belum menginterpretasi faktor yang mempengaruhi pelibatan politik mahasiswa
4. Pada saat uji coba terakhir di Universitas Negeri Yogyakarta, bertepatan dengan menyebarnya wabah Covid 19 di Indonesia pada Tahun 2020, sehingga dimungkinkan memiliki dampak yang terbatas pada situasi non pandemi.
5. Pelibatan politik dan *online engagement* mahasiswa berada pada situasi Covid 19 di Indonesia pada Tahun 2020.